

EVALUASI MANAJEMEN PEMILU 2024 TERHADAP GUGURNYA PETUGAS BADAN AD HOC

6

Sidiq Budi Sejati*

Abstrak

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah terulangnya kembali korban jiwa pada Pemilu 2024. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesalahan yang perlu menjadi perhatian. Tulisan ini ingin mengkaji langkah apa yang harus diperbaiki pemerintah ke depan untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa gugurnya petugas badan ad hoc, terlebih menjelang Pilkada Serentak 2024. Pemerintah masih perlu melakukan langkah perbaikan dari aspek administratif seperti kepatuhan pemenuhan persyaratan usia dan manajemen pemilu di lapangan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mendorong KPU melakukan evaluasi kembali terhadap tahapan pemilu, terutama dari sisi manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik yaitu dengan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan pemenuhan persyaratan administratif, hingga persiapan teknis oleh penyelenggara badan ad hoc di lapangan. Sedangkan dari sisi anggaran, Komisi II DPR RI dapat memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengevaluasi kembali anggaran pemenuhan fasilitas dan kebutuhan operasional di lapangan berdasarkan standar kemahalan sesuai wilayah masing-masing TPS.

Pendahuluan

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI yang membahas evaluasi Pemilu 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, mengungkapkan terdapat 181 petugas badan *ad hoc* KPU yang gugur saat menjalankan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Petugas tersebut terdiri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain petugas yang meninggal dunia, Ketua KPU juga menjelaskan terdapat sebanyak 4.770 petugas yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit (Aditya & Ihsanudin,



* Analis legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: sidiq.sejati@dpr.go.id.

2024). Sebagai perbandingan, pada saat Pemilu 2019, jumlah petugas badan *ad hoc* yang meninggal dunia mencapai 894 petugas dan sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit (Mashabi & Erdianto, 2020).

Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa perubahan terhadap kebijakan pada Pemilu 2019, gugurnya petugas badan *ad hoc* tetap saja terjadi kembali dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tulisan ini hendak mengkaji langkah apa yang harus diperbaiki pemerintah ke depan, khususnya KPU, untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa gugurnya para petugas badan *ad hoc* dalam menjalankan tugasnya, terlebih menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Faktor Penyebab Gugurnya Petugas Badan Ad Hoc

Salah satu contoh petugas badan *ad hoc* yaitu anggota KPPS yang menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Anggota KPPS terdiri dari tujuh orang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS meliputi seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan enam lainnya sebagai anggota, di mana anggota keempat dan anggota ketujuh KPPS dapat merangkap tugas sebagai penjaga ketertiban di TPS jika tidak terdapat petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah anggota KPPS dalam Pemilu 2024 sebanyak 5.741.127 orang (Ningrum, 2024).

KPPS memiliki peran sangat penting. Anggota KPPS harus dapat memastikan hasil pemungutan suara dari masyarakat terekap dan dihitung sedetail mungkin.

Petugas KPPS juga harus siap dalam menjaga ketertiban agar tidak muncul kekacauan di TPS, mulai dari persiapan, pencoblosan, sampai dengan perhitungan surat suara. KPPS mulai bekerja dari pagi buta hingga malam hari. Faktor kelelahan dianggap sebagai penyebab kematian petugas KPPS karena beban kerja yang terlalu berat untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pemilu. Sebagian besar petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2024 diketahui bekerja selama 24 jam untuk menyelesaikan penghitungan beserta penyelesaian administrasinya (Ningrum, 2024).

Angka jumlah petugas yang meninggal dunia dan yang sakit pada Pemilu 2024 memang jauh menurun dibandingkan pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Anggota KPU, Idham Holik, mengungkapkan faktor penyebab petugas meninggal dunia pada Pemilu 2019 antara lain disebabkan beban kerja yang cukup berat, kelelahan, dan penyakit penyerta (komorbid). Riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Universitas Gajah Mada, dan Ikatan Dokter Indonesia juga menemukan bahwa faktor komorbid menjadi penyebab kematian petugas KPPS, di mana tiga penyakit komorbid terbanyak yang diderita petugas pada Pemilu 2019 adalah tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan diabetes. KPU juga menemukan bahwa sebagian besar petugas KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta (Sinambela, 2024).

Upaya yang Perlu Dilakukan

Banyaknya kasus anggota KPPS yang berguguran pada

Pemilu 2019 sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan menyiapkan berbagai inovasi kebijakan sebagai langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya kasus kematian ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2024. Kebijakan tersebut antara lain membatasi usia rekrutmen calon anggota KPPS mulai dari usia 17 sampai dengan 55 tahun, sebelumnya dimulai dari 21 tahun dan tidak ada pembatasan usia maksimal. Hal ini ditetapkan karena berkaitan dengan daya tahan tubuh saat menjalankan tugas (Sinambela, 2024).

Selain itu telah dilakukan skrining kesehatan sebagai langkah awal dalam memastikan kondisi petugas memiliki penyakit bawaan atau tidak, serta perbaikan perolehan honor bagi petugas Pemilu 2024 sebesar Rp 1,2 juta untuk ketua KPPS dan anggota sebesar Rp 1,1 juta. Pemerintah juga telah melakukan perbaikan jaminan sosial melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), di mana dalam salah satu komponennya yang termasuk tenaga kerja adalah penyelenggara pemilu. Dari sisi beban kerja, KPU juga telah menyiapkan anggaran untuk fotokopi salinan C hasil, yang selama ini harus ditulis tangan untuk menyalin sekitar 34 salinan (Prihamanda, 2024). KPU juga telah menjalankan Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) 2024 yang merupakan alat bantu untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara di TPS, meskipun dalam praktiknya masih mengalami banyak kendala (Purnamasari, 2024).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa sekitar 30% petugas yang meninggal dunia berusia 51–60 tahun (Purnamasari, 2024). Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama dari sisi perekrutan anggota badan *ad hoc* agar lebih taat dan patuh terhadap syarat administratif, khususnya syarat batasan umur, dimana sebaiknya penyelenggara pemilu melibatkan lebih banyak generasi muda seperti mahasiswa dengan asumsi mereka memiliki fisik yang masih bugar dan sedikit atau bahkan tidak memiliki risiko kesehatan. KPU juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada mahasiswa di berbagai kampus agar dapat ikut serta menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Hal ini penting sebagai wujud keteladanan politik generasi muda dalam semangat demokrasi. KPU juga perlu mendorong kampus agar dapat memberikan bobot nilai tersendiri bagi mahasiswa yang bersedia menjadi anggota KPPS. Pada Pemilu 2024 ini, petugas KPPS mendapat perhatian yang cukup besar dari para netizen melalui konten-konten di berbagai media sosial, mulai dari rasa bangga sampai dengan nada satire mengenai harapan-harapan perbaikan nasib anggota KPPS ke depan. Hal ini menunjukkan ekspresi generasi muda terhadap keterlibatannya menjadi anggota KPPS dan KPU perlu mengambil perhatian terhadap fenomena tersebut sebagai bahan masukan untuk menjaga tingkat antusiasme generasi muda ke depannya.

Perbaikan terhadap pengelolaan tahapan pemilu juga perlu dilakukan, mulai dari pelantikan

penyelenggara *ad hoc*, dilanjutkan dengan persiapan bimbingan teknis yang dapat dilakukan lebih awal secara bertahap sehingga pemahaman petugas KPPS tidak minim. Persiapan pembangunan TPS dapat dilakukan lebih cepat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan menyediakan anggaran yang cukup untuk pembangunan TPS dengan mempertimbangkan standar waktu sewa di lokasi setempat. Dari aspek keselamatan, anggaran tersebut juga harus menjamin TPS dibangun cukup kokoh untuk menghadapi cuaca ekstrem, mengingat hari pelaksanaan Pemilu 2024 sebagian wilayah Indonesia dalam kondisi cuaca yang kurang baik. Selain itu, diperlukan anggaran untuk menjaga lingkungan sekitar TPS tetap bersih dan sehat dengan membayar petugas kebersihan secara tersendiri. Selanjutnya menyediakan anggaran konsumsi yang lebih dari cukup untuk membelanjakan makanan sehat, bahkan dari anggaran tersebut dapat disediakan vitamin.

Penutup

Meskipun jumlah petugas badan *ad hoc* yang gugur maupun yang sakit pada Pemilu 2024 menurun secara signifikan dari Pemilu 2019, namun nyatanya masih perlu dilakukan perbaikan, terutama dari ketaatan aspek administratif, seperti pemenuhan persyaratan usia dan perbaikan manajemen pemilu dari sisi teknis di lapangan. Pemerintah perlu mencari cara untuk memotivasi generasi muda seperti mahasiswa agar mereka dapat lebih tertarik untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mendorong KPU melakukan evaluasi kembali terhadap pengelolaan tahapan pemilu, terutama dari sisi manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik akan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan pemenuhan persyaratan administratif hingga persiapan teknis oleh penyelenggara badan *ad hoc* di lapangan. Dari sisi anggaran, Komisi II DPR RI dapat memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengevaluasi kembali anggaran pemenuhan fasilitas dan kebutuhan operasional di lapangan berdasarkan standar kemahalan sesuai wilayah masing-masing TPS.

Referensi

- Aditya, N.R., & Ihsanudin. (2024, Maret 25). KPU ungkap 181 petugas pemilu meninggal pada 14-25 Februari. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/13462131/kpu-ungkap-181-petugas-pemilu-meninggal-pada-14-25-februari>.
- Mashabi, S., & Erdianto, K. (2020, Januari 22). Refleksi pemilu 2019, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.
- Ningrum, M.K. (2024, Februari 5). Kisah kelam gugurnya 894 petugas KPPS di pemilu 2019, apa saja masalah yang mereka alami saat ini? *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/>

read/1829787/kisah-kelam-gugurnya-894-petugas-kpps-dipemilu-2019-apa-saja-masalah-yang-mereka-alami-saat-ini.

Prihamanda, B.A. (2024, Februari 20). KPU: Pemilu 2019 ada 722 petugas KPPS meninggal, pemilu 2024 ada 71 petugas. republika.co.id. <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s94woy330/kpu-pemilu-2019-ada-722-petugas-kpps-meninggal-pemilu-2024-ada-71-petugas>.

Purnamasari, D.D. (2024, Maret 27). Ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia, pola rekrutmen mendesak dibenahi. kompas.id. <https://app.kompas.com/VABzkZdwC5HdYKD37?efr=1>.

Purnamasari, D.D. (2024, Februari 18). Sirekap, alat bantu pemilu yang justru timbulkan kegaduhan. [kompas.id](https://app.kompas.com/yzbnBQbrUErHZTQG8?efr=1). <https://app.kompas.com/yzbnBQbrUErHZTQG8?efr=1>.

Sinambela, N.M. (2024, Januari 31). KPU siapkan inovasi kebijakan cegah petugas KPPS meninggal dunia. [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/3940095/kpu-siapkan-inovasi-kebijakan-cegah-petugas-kpps-meninggal-dunia). <https://www.antaranews.com/berita/3940095/kpu-siapkan-inovasi-kebijakan-cegah-petugas-kpps-meninggal-dunia>.